

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN NELAYAN DI KOTA BANDA ACEH  
(Studi Kasus : Nelayan Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota  
Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RAMADHAN**

**NIM : 140802003**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M/1439 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu  
Administrasi Negara

Diajukan Oleh:

RAMADHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Administrasi Negara  
NIM: 140802003

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIDN: 2020107202

Pembimbing II



Zakki Fuad Khalil, M.Si.

NIDN: 2019119001

# SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara

Diajukan oleh:

**RAMADHAN**

**140802003**

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 16 Agustus 2018 M

04 Dzulhijjah 1439 H

Di

Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



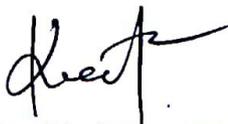
Dr. Mahmuddin, M.Si.  
NIDN.2020107202

Sekretaris,



Zakki Fuad Khalil, M.Si.  
NIDN. 2019119001

Penguji I,



Taufik, S.Sos, M.Si.  
NIDN. 2018058903

Penguji II,



Siti Nur Zalikha, M.Si.  
NIDN. 2128029002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN AR-RANIRY

  
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197307232000032002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ramadhan  
NIM : 140802003  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas : UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Agustus 2018

Yang menyatakan,

  
  
**RAMADHAN**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Kota Banda Aceh”.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan kepada ayahanda tercinta Rajudin Abbas dan ibunda Baidah yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang tanpa meminta balas kasih. Penulis juga sekaligus meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuat. Karena dukungan beliau pulalah sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penulis menyadari begitu banyak pengorbanan yang telah beliau berikan dari kecil hingga dewasa. Dan juga terimakasih sebesar-besarnya kepada nenek, abang, kakak dan adik-adik tercinta yang selalu mendoakan penulis selama penulisan skripsi.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

3. Dr. Mahmuddin, M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Delfi Suganda, LL.M, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Mahmuddin, M.Si. selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Zakki Fuad Khalil, M.Si. selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan segenap waktu, arahan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada seluruh teman seangkatan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang selalu memberikan arahan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis ucapkan terimakasih atas perhatiannya.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Fokus Penelitian .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Penelitian Terdahulu.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Konsep Strategi .....	9
1. Pengertian Strategi.....	9
2. Ciri-ciri Strategi.....	10
B. Kesejahteraan.....	11
1. Pengertian Kesejahteraan.....	11
2. Indikator Kesejahteraan .....	11
C. Nelayan .....	16
1. Pengertian Nelayan.....	16
2. Sebab-sebab Kemiskinan Nelayan .....	17
D. Dasar Hukum .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>

A. Jenis Penelitian .....	20
B. Lokasi Penelitian .....	22
C. Teknik Pengumpulan Data .....	22
D. Teknik Analisis Data .....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
1. Kondisi Geografis Gampong Lampulo.....	26
2. Visi dan Misi Gampong Lampulo .....	27
3. Struktur Organisasi Aparatur Pemerintahan Gampong Lampulo .....	28
4. Kondisi Demografis Gampong Lampulo .....	28
B. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh .....	33
1. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.....	34
2. Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh .....	34
3. Struktur Organisasi DKP Kota Banda Aceh .....	35
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	36
1. Kondisi Kesejahteraan Nelayan Lampulo.....	36
2. Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan....	40
3. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Contoh Kartu Nelayan .....	44
Gambar 2 Proses Pembuatan Kartu Nelayan (E-Kartu Nelayan).....	45
Gambar 3 Alur Proses Pemberian Bantuan.....	47
Gambar 4 Bangunan Pasar Ikan .....	51

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Aparatur Pemerintahan Gampong.....	28
Tabel 2 Jumlah Penduduk Tahun 2016.....	30
Tabel 3 Jumlah Penduduk Tahun 2017.....	30
Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Kemiskinan.....	31
Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	31
Tabel 6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	32
Tabel 7 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.....	35
Tabel 8 Pembuatan Kartu Asuransi Nelayan .....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1: Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol
- Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Kantor Camat
- Lampiran 3: Daftar Pertanyaan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
- Lampiran 4: Daftar Pertanyaan dengan Nelayan
- Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian

## **ABSTRAK**

Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah dengan menerbitkan Kartu Nelayan, dengan adanya Kartu Nelayan bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan kepada nelayan agar tepat sasaran. Namun dalam pelaksanaannya masih ada nelayan yang sudah memiliki Kartu Nelayan namun tidak pernah mendapatkan bantuan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan yaitu pelatihan, memberikan bantuan, membangun sarana dan prasarana serta pemberian bantuan premi asuransi nelayan, dari empat strategi belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan masih terdapat pelatihan yang tidak diikuti oleh semua nelayan, kurangnya pemerataan pemberian bantuan dan belum berfungsinya ruang pendingin ikan dan pasar ikan. Dalam penerapan strategi terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang bersifat internal dan eksternal yaitu pegawai yang mencukupi, lokasi yang strategis serta hubungan kerja yang baik. Sedangkan faktor penghambat yang bersifat internal dan eksternal yaitu keterbatasan dana, fasilitas yang tidak memadai, tingkat pendidikan nelayan rendah serta kurangnya partisipasi nelayan.

*Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Kesejahteraan Nelayan*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayah perairannya cukup luas, dengan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dapat menjadi andalan untuk mendukung pembangunan nasional. Meskipun Indonesia negara kepulauan tetapi hanya sebagian kecil dari penduduknya yang berdiam hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan pesisir. Nelayan merupakan salah satu bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah yang ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) disebabkan rata-rata para nelayan hanya lulus sekolah dasar yang hanya bisa mengandalkan keahlian yang terbatas.<sup>1</sup>

Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pernah menghiasi visi-misinya yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan membangun sistem maritim Indonesia yang tertinggal dan menjadikan maritim sebagai kekuatan diplomasi politik luar negeri.<sup>2</sup> Tentunya salah satu yang dimaksud dalam program tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan.

---

<sup>1</sup> Kusnadi, Jaminan Sosial Nelayan, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hal.8.

<sup>2</sup> <https://news.detik.com/berita/2605821/ini-visi-misi-jokowi-jk-soal-pembangunan-maritim-indonesia?9922032>= Diakses pada tanggal 23 Mei 2018, jam 10.00.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah adalah Provinsi Aceh. Aceh dengan luas wilayah laut 295.370 km<sup>2</sup>, produksi perikanan laut Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 produksi perikanan laut mencapai 154.487,40 ton, meningkat 8% dari sebelumnya 145.883,6 ton pada 2012. Nilai produksi perikanan laut Aceh pada 2014 mencapai Rp 2,9 triliun (Aceh Dalam Angka, 2015). Diperkirakan potensi perikanan laut Aceh mencapai lebih dari 200.000 ton pertahun. Besarnya potensi perikanan laut dinilai masih belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan nelayan Aceh. Tetapi jika dikaitkan dengan persentase jumlah penduduk miskin Aceh yang mencapai 17,11% (di atas rata-rata Nasional), maka diduga kuat sebagian besar masyarakat Aceh yang berprofesi sebagai nelayan masih belum sejahtera.<sup>3</sup>

Salah satu kota di provinsi Aceh yang dianugerahi potensi kelautan dan perikanan yang besar adalah Kota Banda Aceh yang terdapat di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam. PP Lampulo Banda Aceh terletak pada posisi geografis 5,576336 N dan 95,323058 E, secara tata kelola operasional merupakan salah satu UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang berada dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh. Posisi geografis Kota Banda Aceh yang berada di ujung Barat Pulau Sumatera, dan berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional yaitu Samudera Hindia dan Selat Malaka, dapat

---

<sup>3</sup> [https://serambinews.com\\_Nelayan\\_Aceh](https://serambinews.com_Nelayan_Aceh). Diakses pada tanggal 23 Mei 2018, jam 11.00

menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan (PP) Lampulo menjadi pelabuhan perikanan bertaraf internasional.<sup>4</sup>

Diantara upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah dengan menerbitkan Kartu Nelayan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adanya Kartu Nelayan ini diharapkan menjadi materi kongkret proses pemberdayaan nelayan sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, serta menjadi acuan pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Namun berdasarkan realita yang ada nelayan kecil (nelayan buruh) di Gampong Lampulo yang sudah bekerja lebih 20 tahun dan memiliki Kartu Nelayan namun tidak pernah mendapatkan bantuan berupa perahu/kapal motor maupun alat tangkap lainnya. Meskipun nelayan kecil mengetahui adanya pemberian bantuan kepada nelayan lainnya, namun tidak semua nelayan kecil pernah mendapatkan bantuan, maka dari itu kurangnya pemerataan pemberian bantuan kepada nelayan kecil.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka situasi ini menarik untuk dikaji lebih jauh tentang **“Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Kota Banda Aceh”**.

---

<sup>4</sup> <https://dkp.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2016/10/12/116/pelabuhan-perikanan-lampulo.html>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Gampong Lampulo Kota Banda Aceh ?

## **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah nelayan dan pemerintah. Nelayan yang dimaksud penulis yaitu nelayan kecil (nelayan buruh) karena kebanyakan nelayan buruh yang memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah. Sedangkan pemerintah yang dimaksud penulis yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh sebagai aktor yang mengatur strategi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan sebagai aktor pemberian bantuan kepada nelayan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Gampong Lampulo Kota Banda Aceh.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan di bidang Ilmu Administrasi Negara, terutama yang berkaitan tentang strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, memberikan pemahaman kepada nelayan dalam menanggapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan bisa dijadikan referensi tugas mata kuliah yang berkaitan dengan permasalahan kesejahteraan nelayan.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ditulis oleh David Z yang berjudul “Usaha-Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Nelayan (Studi Desa Pasar Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat)”.<sup>5</sup> Ia mengemukakan bahwa, nelayan di Desa Pasar pada umumnya melakukan pekerjaan alternatif di luar perikanan atau disversifikasi pekerjaan. Namun usaha-usaha tersebut masih sangat terbatas. Dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan juga melibatkan anak dan istrinya. Upaya peningkatan pendapatan di sektor perikanan, pemerintah juga memberikan bantuan berupa perahu viber dan pembuatan rumpon. Dari hasil penelitian ini juga diketahui bahwa pengeluaran nelayan lebih rendah dibandingkan jumlah pendapatan, terlebih setelah mereka melakukan pekerjaan alternatif diluar sektor perikanan.

Fokus penelitian yang diteliti oleh David Z yaitu untuk mengetahui usaha-usaha nelayan dalam meningkatkan pendapatan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan,

Penelitian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dwi Rachma yang berjudul “Kondisi dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Nelayan di Desa Pasir Kebumen”.<sup>6</sup> Ia mengemukakan bahwa, penghasilan nelayan di Desa Pasir cukup besar meskipun bersifat fluktuatif. Seharusnya

---

<sup>5</sup> David Z. *Usaha-Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Nelayan pada Desa Pasar Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat*, (Bandar Lampung: Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2017)

<sup>6</sup> Annisa Dwi Rachma. *Kondisi dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Nelayan di Desa Pasir Kebumen*, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017)

penghasilan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Akan tetapi pada kenyataannya tingkat kesejahteraan keluarga nelayan di Desa Pasir masih tergolong rendah. Kesulitan muncul ketika musim paceklik tiba. Selain menjelaskan tentang kondisi kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan, peneliti juga mengkaji dari segi upaya keluarga nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa kondisi perekonomian di Desa Pasir mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga apabila hanya bekerja sebagai nelayan. Keluarga nelayan Desa Pasir memiliki strategi-strategi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Strategi-strategi tersebut yakni mendorong anggota keluarga lainnya seperti istri dan anak untuk turut membantu meningkatkan perekonomian, strategi diversifikasi pekerjaan dan strategi jaringan sosial. Dengan melakukan upaya tersebut, keluarga nelayan dapat meningkatkan kondisi kesejahteraan ekonomi keluarganya. Hal tersebut terbukti dengan keluarga nelayan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta meminimalisir hutang.

Fokus penelitian yang diteliti oleh Annisa Dwi Rachma yaitu untuk mengetahui kondisi ekonomi nelayan dan upaya-upaya nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Selanjutnya penelitian ketiga yang diteliti oleh Ririn Marini “Analisis Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten

Nagan Raya”.<sup>7</sup> Ia mengemukakan dari hasil analisis penelitiannya biaya total rata-rata operasional nelayan di Kecamatan Kuala Pesisir adalah sebesar Rp. 666.667 sementara keuntungan rata-rata pemilik kapal Per-Trep nya sebesar Rp. 1.333.333 sedangkan ABK mendapat keuntungan Per-Trep nya sebesar Rp. 678.667 sedangkan pendapatan/keuntungan rata-rata pemilik kapal perbulannya sebesar Rp. 2.714.667. Jika dilihat dari hasil yang didapat dari usaha nelayan baik pemilik kapal dan ABK berarti usaha ini menjanjikan dan menguntungkan.

Fokus penelitian yang diteliti oleh Ririn Marini yaitu terletak pada analisis pendapatan rumah tangga nelayan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

---

<sup>7</sup> Ririn Marini, *Analisis Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya*, (Meulaboh, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar, 2013)

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Strategi**

##### 1. Pengertian Strategi

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>1</sup> Strategi juga didefinisikan sebagai cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.<sup>2</sup> Definisi lain juga menyebutkan bahwa strategi adalah pola keputusan di dalam suatu organisasi yang membentuk dan menampilkan tujuan dan sasaran dari organisasi itu, ia melahirkan kebijaksanaan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa strategi adalah suatu proses yang dibentuk pada tatanan organisasi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan sasaran sehingga mampu mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien.

---

<sup>1</sup> Umar Husein, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: PT.Gramedia Utama, 2001) hal.31

<sup>2</sup> Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal.139

<sup>3</sup> J.Salusu. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan organisasi Nonprofit*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996), hal. 89

## 2. Ciri-ciri Strategi

Adapun yang menjadi ciri-ciri strategi menurut Stoner dan Sirait adalah :<sup>4</sup>

- a) Wawasan waktu, yang mana dengan wawasan waktu agar bisa melihat jauh ke depan setiap langkah yang diambil dalam melaksanakan suatu program.
- b) Dampak, yang dimana dampak merupakan hasil akhir dari suatu strategi yang ditetapkan, namun melihat dampak perlu diperhatikan walaupun belum pasti terlihat.
- c) Pemusatan upaya, maka untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemusatan upaya ini sangat diperlukan agar sebuah strategi dapat berjalan efektif
- d) Pola keputusan, kebanyakan strategi mensyaratkan bahwa sederetan keputusan tertentu harus diambil sepanjang waktu. Keputusan-keputusan tersebut harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten.
- e) Peresapan sebuah strategi mencakup suatu spectrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan operasi harian. Selain itu, adanya konsistensi sepanjang waktu dalam kegiatan-kegiatan ini mengharuskan semua tingkatan organisasi bertindak secara naluri dengan cara-cara yang akan memperkuat strategi.

---

<sup>4</sup> Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hal.18-19

## **B. Kesejahteraan**

### 1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Arthur Dunham Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial.<sup>5</sup>

Maka dari pengertian yang telah dipaparkan penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Aceh adalah nelayan, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yaitu dengan cara pemerintah menyalurkan bantuan baik berupa moril maupun materil untuk membangun sebuah sistem yang mampu melindungi dan menjaga harkat serta martabat nelayan Aceh dengan memberikan mereka kesempatan untuk hidup sejahtera dan membuka seluas-luasnya untuk membangun daya saing.

### 2. Indikator Kesejahteraan

Menurut *welfare Indicators* dalam buku Indikator Kesejahteraan Rakyat tercantum beberapa indikator kesejahteraan rakyat:

#### a) Kependudukan

Masalah kependudukan yang antara lain meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi

---

<sup>5</sup> Sumarnonugroho. *Sistem Intervensi Kesejahteraan sosial*, (Yogyakarta: PT.Hanindita, 1987), hal.28

potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam penanganan masalah kependudukan, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Disamping itu, program perencanaan pembangunan sosial disegala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

b) Kesehatan dan gizi

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik. Indikator tersebut meliputi angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang menjadi indikator utama. Selain itu, aspek penting yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan

c) Pendidikan

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan anak

usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Untuk mengetahui indikator pendidikan itu dilihat dari angka melek huruf dan tingkat pendidikan, tingkat partisipasi sekolah, putus sekolah, rasio murid-guru dan murid-kelas.

#### d) Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat dimana tolak ukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK menggambarkan persentase penduduk berumur 15 tahun lebih yang termasuk dalam angkatan kerja, sedangkan TPT menggambarkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

#### e) Taraf dan Pola Konsumsi

Berkurangnya jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sebaliknya meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk, dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

#### f) Perumahan dan Lingkungan

Manusia dan alam lingkungannya baik lingkungan fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Selain kebutuhan sandang dan pangan, rumah juga merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Secara umum, kualitas tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, dimana kualitas tersebut ditentukan oleh fisik rumah tersebut yang dapat terlihat dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

g) Sosial Lainnya

Pembahasan mengenai aspek sosial lainnya difokuskan pada kegiatan yang mencerminkan kesejahteraan seseorang, seperti melakukan perjalanan “wisata” dan juga akses menikmati informasi dan hiburan yang meliputi menonton televisi, mendengarkan radio, membaca surat kabar dari mengakses internet. Karena pada umumnya semakin banyak seseorang memanfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan yang bersifat sosial maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki tingkat kesejahteraan semakin meningkat.<sup>6</sup>

Indikator kesejahteraan lainnya menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a) Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, yaitu umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah/sekolah dan berpergian, rumah yang ditempati keluarga

<sup>6</sup> Welfare indicators, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: BPS, 2006). hal.3-6

<sup>7</sup> Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Batu Bara: Jurnal Geografi, Vol 9, No.1,2017), Hal.58-59

mempunyai atap lantai dan dinding yang baik, bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan, bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi, semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

- b) Keluarga sejahtera tahap II adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar (kesejahteraan tahap I) dan psikologis. Adapun indikator-indikator tersebut yaitu pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Paling kurang sekali seminggu menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk dan pauk. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> tiap penghuni rumah. Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat. Ada seseorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi kecuali yang sedang hamil.
- c) Keluarga sejahtera tahap III adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan pengembang. Indikator-indikator tersebut yaitu mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga dalam bentuk uang dan barang. Kebiasaan makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga. Keluarga ikut

dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/TV/internet.

- d) Keluarga sejahtera tahap III Plus adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan aktualisasi diri seperti secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ intitusi masyarakat.

Penulis menggunakan indikator menurut BKKBN, karena indikator yang diberikan sesuai dengan objek penelitian yang penulis lakukan.

### **C. Nelayan**

#### **1. Pengertian Nelayan**

Nelayan adalah sekelompok masyarakat yang pada umumnya tumbuh dan berkembang di pesisir pantai yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut dan merupakan mata pencaharian yang utama (Imron, 2003). Seperti yang kita ketahui nelayan terdiri atas 3 ciri yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh ini adalah nelayan menggunakan setiap peralatan orang lain, dan jenis nelayan ini sangat banyak diminati di Aceh, sedangkan nelayan jurangan adalah nelayan memiliki alat tangkap sendiri namun di pergunakan/dioperasikan oleh orang lain (nelayan buruh) dan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan dan mengoperasikannya sendiri.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hal.10

## 2. Sebab-sebab Kemiskinan Nelayan

Penyebab timbulnya kelangkaan sumber daya perikanan, yang kemudian mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan, kemiskinan, dan kesejahteraan merupakan sebagian dari sebab-sebab yang kompleks. Sebab-sebab yang kompleks tersebut dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu, sebab yang bersifat internal dan sebab eksternal.<sup>9</sup>

Adapun sebab-sebab kemiskinan yang bersifat internal yang berkaitan dengan sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka ini mencakup masalah :

- a) Keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan.
- b) Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan.
- c) Hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh
- d) Kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan
- e) Ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan
- f) Gaya hidup yang dipandang “boros” sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

Sedangkan sebab-sebab kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja yang mencakup:

- a) Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial.

---

<sup>9</sup> Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hal.18-19

- b) Sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara.
- c) Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran wilayah darat.
- d) Penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan
- e) Penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan.
- f) Terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen.
- g) Terbatasnya peluang kerja disektor nonperikanan yang tersedia di desa-desa nelayan.
- h) Kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut.

#### **D. Dasar Hukum**

Gubernur Provinsi Aceh dr. H. Zaini Abdullah menegaskan komitmennya untuk melaksanakan mandat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Komitmen itu dilaksanakan bersama dengan Panglima Laot, Jaringan Kuala, dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Dengan adanya kesepakatan bersama ini, diharapkan upaya menyejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di Aceh bisa direalisasikan. Kesepakatan itu sendiri memuat tiga poin penting. Pertama, Pemerintah Aceh wajib membuat kebijakan turunan UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di Aceh. Kedua, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh wajib melibatkan Panglima Laot, perwakilan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam pada proses

penyusunan dan penetapan rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam mengimplementasikan UU No 7/2016. Ketiga, Pemerintah Aceh berkomitmen mengalokasikan anggaran dalam memenuhi hak-hak dasar nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam demi kesejahteraan mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.*

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui strategi Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh) maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran.

Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>1</sup> Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

Penelitian kualitatif memiliki tiga komponen utama sebagaimana dikemukakan oleh Strauss (dalam Ahmadi, 2014), sebagai berikut: <sup>2</sup>

- a) Ada data yang datang dari berbagai sumber. Wawancara dan observasi merupakan sumber-sumber yang paling umum digunakan.
- b) Dalam penelitian kualitatif terdiri atas prosedur-prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda yang digunakan untuk sampai pada temuan atau teori. Prosedur-prosedur itu termasuk teknik-teknik untuk konseptualisasi

---

<sup>1</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

<sup>2</sup>[http://www.academia.edu/32993954/Metode\\_Penelitian\\_kualitatif](http://www.academia.edu/32993954/Metode_Penelitian_kualitatif). diakses pada tanggal 7 Juni 2018, jam 11.00.

data. Proses ini disebut “pengodean” (coding), yang bermacam-macam karena pelatihan, pengalaman dan tujuan peneliti.

- c) Laporan tertulis dan verbal. Hal ini bisa ditunjukkan dalam jurnal-jurnal atau konferensi ilmiah serta mengambil bentuk-bentuk yang beragam bergantung pada audiensi dan aspek temuan teori yang ditunjukkan. Misalnya, seseorang bisa memaparkan peninjauan luas (overview) seluruh temuan atau diskusi mendalam tentang satu bagian dari kajian.

Dari beberapa teori diatas dapat dilihat bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang melibatkan langsung peneliti kedalam subjek yang akan diteliti. Dengan ini maka peneliti akan lebih mengetahui secara jelas bagaimana subjek penelitian dalam kehidupannya sehari-hari. Pada intinya metode penelitian kualitatif adalah menggambarkan secara jelas apa yang peneliti temukan di lapangan. Banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi dan itu semua akan menambah kekayaan dan kedalaman dari hasil penelitian. Menurut J.R. Raco bahwa dalam penelitian setiap informasi yang didapatkan bisa saja mengubah arah penelitian, ini terjadi bahwa ada praduga dan asumsi peneliti tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh partisipan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulanny*, .(Jakarta: PT.Grasindo, 2010), hal.8

## **B. Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian dilakukan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan pertimbangan banyaknya nelayan yang bertempat tinggal di kelurahan ini serta Pelabuhan Lampulo merupakan salah satu target program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>4</sup>

Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian.<sup>5</sup> Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap obyek alam lainnya, agar peneliti lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak.

b) Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).<sup>6</sup> Adapun narasumber dalam penelitian adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, toke boat, dan Nelayan Buruh Gampong Lampulo.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah,

---

<sup>5</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, Op.cit, hal.165

<sup>6</sup> Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.23

prasasti, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.<sup>7</sup>

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan dan setelah selesai di lapangan.<sup>8</sup> Dalam hal ini, Nasution (1988) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan langsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data.

Teknik analisis data merupakan metode dalam memilah dan mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk pemecahan masalah dalam penelitian sehingga bisa mengambil kesimpulan. Menurut sugiyono dalam analisis data untuk mempermudah dalam mengolah data, ada beberapa langkah dalam penganalisaan data sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Mengumpulkan sejumlah data untuk diseleksi dan dilakukan analisis.
- b. Menyeleksi data-data yang relevan dengan penelitian.
- c. Menganalisis (membahas) serta menyimpulkan.

---

<sup>7</sup>Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100

<sup>8</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2018), hal.53

<sup>9</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal.277.

Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan, menyeleksi, memutuskan, menganalisa, dan mengaplikasikan serta mengambil kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis Gampong Lampulo**

Pada tahun 1985 gampong Lampulo berubah status tata kota, yaitu dengan terbentuknya Kotamadya Banda Aceh dan menjadi salah satu gampong yang berada dalam kecamatan Kuta Alam. Gampong Lampulo terdiri dari 4 dusun yaitu: dusun T. Tuan Dipulo, dusun Malahayati, dusun Tgk. Disayang dan dusun T. Teungoh. Gampong Lampulo merupakan gampong yang berada pada pinggiran derusan Krueng Aceh yang terhubung hingga ke laut, berdasarkan cerita lama dari penuturan Abdullah Husen (mantan Keuchik Gampong Lampulo) air sungai krueng aceh tersebut sering menguap sehingga terjadi banjir, itulah yang menjadi dasar penyebutan Lam (bahasa Indonesia: Tenggelam), dan dikarenakan Lampulo dulunya merupakan daerah hutan pinggiran laut sehingga disebut dengan istilah pulo (bahasa Indonesia: pulau).<sup>1</sup> Data jumlah penduduk Gampong Lampulo pada tahun 2017 sebanyak 2162 KK yang terbagi atas laki-laki sebanyak 2896 dan perempuan sebanyak 2594 dengan total keseluruhan penduduk berjumlah 5490 Jiwa. Jumlah penduduk miskin gampong lampulo sebanyak 334 KK. Jumlah masyarakat asli gampong lampulo yang pekerjaan sebagai nelayan sebanyak 328 jiwa.

---

<sup>1</sup> <https://gamponglampulo.com/sejarah-gampong-lampulo/>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2018, jam 14.00

## 2. Visi dan Misi Gampong Lampulo

### a. Visi

Terwujudnya pemerintahan dan masyarakat Lampulo yang mandiri dan sejahtera berdasarkan syariat islam.

### b. Misi

- 1) Menjalankan syariat islam melalui penegakan hukum dan partisipasi masyarakat.
- 2) Meningkatkan ekonomi gampong yang mandiri.
- 3) Meningkatkan pelayanan masyarakat disemua bidang.
- 4) Mengembangkan pembangunan infrastruktur gampong yang mandiri dan berkualitas.
- 5) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 6) Meningkatkan kapasitas aparatur gampong.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan anak kurang mampu dan fakir miskin.
- 8) Membina lembaga kemasyarakatan dan generasi muda.
- 9) Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang Posyandu.
- 10) Meningkatkan pemahaman dalam penyelenggaraan Fardhu Kifayah.
- 11) Meningkatkan pembinaan di bidang pengajian Al-Qur'an.
- 12) Meningkatkan kebersihan lingkungan gampong.
- 13) Meningkatkan prasarana olahraga gampong.
- 14) Meningkatkan partisipasi wanita dalam pelaksanaan pembangunan.
- 15) Meningkatkan akses masyarakat ke jaringan sumber air bersih.

### 3. Struktur Organisasi Aparatur Pemerintahan Gampong

Tabel 1 Nama Aparatur Pemerintahan Gampong Lampulo

No	Nama	Jabatan
1.	Samsul Mukhtar	Keuchik
2.	Bahrul Ikhsan, S.Kel	Sekretaris Gampong
3.	Taufik M	Kadus T. Tuan Dipulo
4.	Drs. Nur Husein	Kadus Malahayati
5.	Irwan Saputra	Kadus Tgk. Disayang
6.	Tarmizi	Kadus T. Teungoh
7.	Delfi Meliyana	Kasi Pemerintahan
8.	Febri Angga Nuryandana	Kasi Umum dan Perencanaan
9.	Dedy Juliadi S.E	Kasi Keuangan
10.	Nurnaningsih	Kasi Pelayanan
11.	Deny Setiawa, ST	Kasi Kesejahteraan
12.	Reza Septinaldi	Staf Kaur Umum
13.	Hanisullah	Staf Kaur keuangan
14.	M. Dahlan	Ketua Tuha Peut
15.	M. Thaib Zakaria	Wakil Ketua
16.	Yusmadi YS	Anggota
17.	M. Zubir Ali	Anggota
18.	M. Hasbi Jalil	Anggota
19.	Ir. Saifuddin	Anggota
20.	Sofyan Harun	Anggota
21.	Ir. Maimun Rizalihadi	Anggota

**Sumber:** Profil Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2017

### 4. Kondisi Demografis Gampong Lampulo

#### a) Sosial Budaya dan Ekonomi

Sosial budaya di Gampong Lampulo masih sangat kental, hal ini diwariskan secara turun temurun dan terus ditanamkan kepada generasi muda. Sosial budaya ini sangat mudah dijumpai seperti masih adanya kenduri Laot, kenduri Maulid, dalail qairat (tahlilal di tempat orang meninggal, dan lain-lain), bahkan rasa kebersamaan dan saling membantu masih melekat di masyarakat

Gampong Lampulo, dengan memperlihatkan kebersamaan dalam sistem bergotong royong.

Gampong Lampulo merupakan gampong yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Kuta Alam, kondisi sosial ekonomi Gampong Lampulo sudah sedikit berpengaruh dengan kebudayaan perkotaan hal ini dikarenakan Kecamatan Kuta Alam berdekatan dengan wilayah Kota Banda Aceh.

#### b) Kependudukan Gampong Lampulo

Penduduk Gampong Lampulo pada umumnya adalah pendatang yang menetap menjadi penduduk Gampong Lampulo yang datang dari daerah lain baik dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD maupun dari provinsi lain. Jumlah data penduduk Gampong Lampulo pada tahun 2016 sebanyak 5.441 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk sebanyak 5.490 jiwa. dari jumlah penduduk terbagi atas laki-laki dan perempuan berdasarkan dusun dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 2 Jumlah Penduduk Tahun 2016

No	Nama Dusun	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	T.Tuan Dipulo	1085	1053	2138
2	Malahayati	856	746	1602
3	Tgk. Disayang	485	368	853
4	T.Teungoh	427	421	848
<b>Jumlah</b>				<b>5441</b>

**Sumber:** Profil Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2016

Tabel 3 Jumlah Penduduk Tahun 2017

No	Nama Dusun	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	T.Tuan Dipulo	1094	1046	2140
2	Malahayati	866	745	1611
3	Tgk. Disayang	507	385	892
4	T.Teungoh	429	418	847
<b>Jumlah</b>				<b>5490</b>

**Sumber:** Profil Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2017

Tabel di atas menjelaskan bahwa penduduk Gampong Lampulo meningkat 49 jiwa dari tahun 2016 sampai tahun 2017, serta ditemukan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang di lihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di dusun T. Tuan Dipulo.

Jumlah penduduk Gampong Lampulo tahun 2017 sebanyak 5490 jiwa, dari jumlah tersebut terdapat jumlah penduduk dengan tingkat kemiskinan rendah sebanyak 344 KK. Berikut rincian data jumlah penduduk dengan tingkat kemiskinan Gampong Lampulo yaitu:

Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Kemiskinan

No	Dusun	Jumlah KK
1	T.Tuan Dipulo	166
2	Malahayati	86
3	Tgk. Disayang	64
4	T.Teungoh	18
<b>JUMLAH</b>		<b>334 KK</b>

**Sumber:** Profil Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2017

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak terdapat di dusun T.Tuan Dipulo, dikarenakan dusun T.Tuan Dipulo juga terdapat penduduk terbanyak dari dusun Malahayati, dusun Tgk.Disayang dan dusun T.Teungoh.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan data laporan Kantor Keuchik gampong Lampulo seperti terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Belum sekolah	430	498
2	Belum tamat SD	383	390
3	Tamat SD	717	721
4	Tamat SLTP	1339	1337
5	Tamat SLTA	1515	1561
6	Tamat Diploma I/II	358	357
7	Tamat Diploma III	246	243
8	Strata I	235	233
9	Strata II	77	77
10	Strata III	74	73
<b>JUMLAH</b>		<b>5.374</b>	<b>5.490</b>
<b>TOTAL PENDUDUK</b>		<b>5.374</b>	<b>5.490</b>

**Sumber:** Profil Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2016-2017

Tabel di atas menjelaskan bahwa rata-rata penduduk Gampong Lampulo sudah menyelesaikan pendidikan sampai S1, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Gampong Lampulo akan pendidikan itu sangat tinggi, bahkan sebagiannya sudah menyelesaikan pendidikan sampai S2 dan S3 yang akan menjadi sebuah potensi besar sehingga akan menjadi motor penggerak Gampong Lampulo menuju kearah kemajuan.

Adapun pekerjaan masyarakat Gampong Lampulo itu berbeda-beda, dengan rincian pekerjaan setiap dusun yang ada di Gampong Lampulo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	925
2	TNI/POLRI	111
3	Karyawan Swasta	716
4	Pedagang	1.001
5	Petani	3
6	Nelayan	328
7	Pertukangan	280
8	Lain-lain	2.013

**Sumber:** Profil Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2017

Tabel di atas merupakan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yang terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan total keseluruhan sebanyak 5.377 Jiwa. Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Lampulo yang pekerjaannya sebagai nelayan sebanyak 328 Jiwa. Dari jumlah masyarakat asli Lampulo yang pekerjaannya sebagai nelayan sebanyak 328 jiwa tersebut, namun masih ditambah adanya pendatang yang bekerja sebagai nelayan di Pelabuhan

Lampulo dengan total keseluruhan nelayan Gampong Lampulo sebanyak 1.993 jiwa, diantaranya yang berasal dari Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Meuraksa, Kecamatan Syiah Kuala.

## **B. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di Kota Banda Aceh. Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan kota dan tugas perbantuan yang diberikan kepada kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun fungsi Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai :

- a. Pemberdayaan nelayan kecil.
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).

- c. Penerbitan IUP (Izin Usaha Perikanan) di bidang perikanan yang usahanya dalam satu kota.
- d. Pemberdayakan usaha kecil pembudidayaan ikan dan
- e. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

1. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

Mewujudkan pelayanan maksimal kepada masyarakat dalam urusan kelautan dan perikanan.

2. Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

- a. Melaksanakan tertib administrasi
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
- c. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi
- d. Meningkatkan kualitas serta kemampuan aparatur pelayanan.

### 3. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

Tabel 7 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

No	Nama	Jabatan
22.	Ir. Zulkifli Syahbuddin, MM	Kepala Dinas
23.	drh. Mawardi Silvakarta	Sekretaris
24.	M. Ali, SE	Ka.Sub.bagian Program dan Pelaporan
25.	Muhammad Fazri, SP	Ka.Sub.bagian Keuangan
26.	M. Yusuf, S.Sos	Ka.Sub.bagian Umum,Kepegawaian dan aset
27.	Amir Syarifuddin, S. Pi	Ka.Bidang Perikanan
28.	Zul Ikhsan, S. Pi	Ka. Seksi Pemberdayaan Nelayan
29.	Nurhaida A, SP	Ka. Seksi Perikanan Budidaya
30.	Logi Lisandra, SP	Ka. Seksi Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
31.	drh. Roni Hidayat	KA. UPTD RPH
32.	Sajirun	KA. TU RPH

**Sumber:** Dinas Pangan,Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh 2017

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Kondisi Kesejahteraan Nelayan Lampulo**

Aktivitas keseharian nelayan Gampong Lampulo yaitu ketergantungan pada hasil laut. Nelayan terbagi atas 3 yaitu nelayan juragan, nelayan kecil (nelayan buruh) dan nelayan perorangan, sedangkan sebagian dari nelayan Gampong Lampulo menduduki posisi sebagai nelayan kecil (nelayan buruh) yang terdiri dari 10-25 orang berkelompok dalam satu kapal, bahkan bisa lebih dari 25 orang tergantung besarnya kapasitas kapal. Rata-rata penduduk gampong lampulo berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara, nelayan lampulo yang bekerja sebagai nelayan kecil (nelayan buruh) yang pendapatannya tergantung pada hasil tangkapan dan pembagian hasil antara kelompok nelayan lainnya dengan nelayan juragan sebagai pemilik kapal.

Maka dari itu untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sesuai dengan pengertian kesejahteraan dari segi sosial dilakukan melalui pemberian bantuan, yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dengan memberikan bantuan baik moril atau materil, mulai dari pembangunan sarana dan prasarana nelayan, mengadakan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan nelayan serta membantu nelayan dalam hal pemasaran usaha hasil tangkapan.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang berpedoman pada teori Kusnadi penyebab terjadinya penurunan pendapatan nelayan yang berdampak kepada tingkat kesejahteraan hingga berujung nelayan mengalami kemiskinan, terdapat beberapa penyebabnya kemiskinan nelayan Gampong Lampulo yaitu:

- a) Gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan, ini merupakan penyebab kemiskinan bersifat internal, kalau mengenai keterbatasan modal itu tidak menjadi masalah bagi nelayan, berikut wawancara dengan nelayan:

*“Jaman sekarang itu kan harus serba ada, apalagi anak-anak kita, yang kecil saja sudah pintar memainkan Hp, jadi kita sebagai orang tua ya menurutnya, bahkan kadang kala jajan anak kita sehari-hari lumayan banyak berbeda dengan jaman saya dulu, kalau untuk keterbatasan modal melaut tidak menjadi masalah bagi saya, karena saya kan ikut nelayan juragan, jadi jika ada kekurangan apapun nelayan juragan yang mengatasi semuanya”.*<sup>2</sup>

- b) Kondisi alam yang membuat nelayan tidak memungkinkan untuk melaut, ini merupakan penyebab kemiskinan bersifat eksternal, kondisi alam yang baik membuat nelayan bisa melaut sehingga menambah pendapatan nelayan, sedangkan jika cuaca buruk yang membuat nelayan tidak mungkin melaut berarti pendapatan nelayan berkurang, berikut hasil wawancara dengan nelayan:

*“Kalau cuaca buruk otomatis kita tidak akan melaut, karena kalau kita melaut itu resikonya besar, memang pendapatan kami nelayan berdasarkan hasil tangkapan ikan, kalau tidak melaut berarti tidak ada pemasukan, secara tidak langsung kami harus meminta pinjaman kepada nelayan juragan (pemilik kapal)”.*<sup>3</sup>

Dalam hal ini, jika cuaca melaut tidak mendukung maka pendapatan nelayan berkurang dan utang nelayan juga bertambah, disebabkan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga nelayan. Maka dalam mengatasi

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak Iwan pada tanggal 04 Agustus 2018

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Mustafa pada tanggal 04 Agustus 2018

masalah ini, nelayan harus mengambil pinjaman kepada nelayan juragan (toke boat), berikut hasil wawancara dengan toke boat:

*“Nelayan sering mengambil pinjaman, apalagi cuaca melaut buruk, itu paling sering nelayan ambil pinjaman dan untuk pembayaran biasanya saya potong gaji sedikit sampai lunas dari hasil tangkapan ketika sudah bisa melaut”.*<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa untuk sistem pembayarannya yaitu dari pemotongan hasil tangkapan yang didapatkan ketika cuaca melaut sudah membaik dengan cara bertahap.

Jika nelayan sejahtera maka tingkat kemiskinan akan menurun, dalam hal ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan bukan hanya diukur dari segi ekonomi, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat subjektif. Artinya, tiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara-cara hidup yang berbeda. Maka untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan Gampong Lampulo sesuai dengan teori Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Gampong Lampulo termasuk dalam kategori keluarga sejahtera tahap 1 (satu). Berikut wawancara yang menjawab indikator kesejahteraan:

*“Saya dan keluarga hanya bergantung penghasilan dari hasil melaut, tidak ada pekerjaan lain selain melaut, kalau anak-anak saya masih dalam pendidikan tidak mungkin dulu mereka bekerja, sedangkan istri saya hanya sebagai ibu rumah tangga”.*<sup>5</sup>

Wawancara berikut juga dipertegas oleh nelayan lainnya:

*“kami sekeluarga tidak ada pekerjaan selain nelayan, istri saya paling membantu saya dalam pengolahan ikan asin”.*<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Hendri pada tanggal 04 Agustus 2018

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Mustafa pada tanggal 04 Agustus 2018

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Anwar pada tanggal 04 Agustus 2018

Keluarga nelayan kecil (nelayan buruh) Gampong Lampulo tidak mempunyai pekerjaan selain melaut begitu juga dengan istri nelayan yang hanya tergantung pada penghasilan suami dan membantu suami dalam pengolahan ikan untuk dipasarkan agar menambah pendapatan. Jika nelayan kecil Gampong Lampulo mempunyai sumber penghasilan dari pekerjaan selain melaut berarti nelayan termasuk kategori keluarga sejahtera tahap II, namun realita yang ada berdasarkan observasi dan wawancara nelayan kecil Gampong Lampulo termasuk kategori keluarga sejahtera tahap I (satu). Fakta lain dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

*“Saya dengan keluarga tinggal dirumah bantuan tsunami,dengan 4 orang anak dan Alhamdulillah dalam keadaan bersekolah kecuali anak bungsu saya karena masih berusia 5 tahun”.*<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa nelayan mendapatkan rumah bantuan yang ditempati oleh 6 orang yaitu nelayan, istri nelayan dan 4 orang anaknya. Bila dilihat dari segi bangunannya, rumah bantuan tsunami merupakan rumah yang layak huni dengan atap, lantai dan dinding yang permanen, dan anak-anak nelayan dari umur 7-15 tahun dalam keadaan bersekolah. Fakta wawancara lainnya dapat dilihat dari indikator kesehatan yaitu :

*“Alhamdulillah kalau ada salah satu dari keluarga yang sakit dibawa ke rumah sakit, karena sekarang untuk biaya rumah sakit tidak menjadi kendala lagi, karena sudah gratis, dan untuk sementara belum ada dari keluarga yang sakit parah, biasanya sakit yang diderita yaitu pilek dan pusing”.*<sup>8</sup>

Wawancara lain juga dinyatakan oleh nelayan:

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Anwar pada tanggal 04 Agustus 2018

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Iwan pada tanggal 04 Agustus 2018

*“Biasanya sakit yang diderita seperti pilek, ini dikarenakan cuaca, biasanya langsung beli obat ke apotek, dulu pernah anak mengalami alergi, itu baru saya bawa kerumah sakit atau puskesmas”.*<sup>9</sup>

Keluhan kesehatan yang diderita oleh nelayan kecil Gampong Lampulo adalah pusing dan pilek, mereka para nelayan yang memilih pengobatan sendiri di rumah dengan membeli obat di apotik atau warung jika dirasa sakit yang diderita belum terlalu parah, namun ada juga nelayan yang memilih untuk berobat ke rumah sakit atau puskesmas terdekat jika merasa sakit, karena dirasa lebih praktis dan hemat.

Maka dari fakta yang tersebut diatas baik dari segi pendapatan, pekerjaan, perumahan, pendidikan dan kesehatan terlihat jelas bahwa nelayan Gampong Lampulo berdasarkan indikator kesejahteraan yang dimaksud dari BKKBN termasuk dalam kategori keluarga sejahtera tahap 1 (satu).

## **2. Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan**

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah sudah menyusun strategi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Strategi yang sudah disusun sudah tercantum dalam Rencana strategis (Renstra). Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam RPJMD Revisi Tahun 2017. Renstra Tahun 2017-2022 memuat Target Strategi Tahun 2017-2022 atas seluruh indikator strategi pada tingkatan kegiatan.

Penyusunan rencana strategis dimaksudkan sebagai arah dan pedoman bagi seluruh aparatur pada jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Mustafa pada tanggal 04 Agustus 2018

Aceh sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pembangunan di bidang kelautan dan perikanan selama lima tahun ke depan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan rencana strategis ini adalah agar aparatur pada jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh memiliki pandangan yang sama terhadap arah pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang selaras dan sejalan dengan visi, misi serta kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh. Adapun strategi yang diadakan dinas dalam meningkatkan pendapatan nelayan demi terciptanya kehidupan nelayan yang sejahtera sebagai berikut:

a) Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan nelayan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh berdasarkan program pemberdayaan nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan yaitu menerapkan strategi dari segi pengadaan pelatihan guna menciptakan pengetahuan yang baru, keterampilan yang baru serta pembekalan inovasi dan terobosan baru mengenai teknologi penangkapan. Berikut wawancara terkait dengan pegawai:

*“Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan maka dinas akan memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan agar nelayan paham dalam pengelolaan usaha nelayan, peningkatan produksi hingga membantu akses pemasaran, maka dari itu nelayan perlu dibina serta nelayan akan dibekali dengan inovasi teknologi penangkapan, agar nelayan bisa mencari ikan lebih jauh, karena semakin jauh nelayan itu menjelajah semakin banyak hasil tangkapan yang mereka dapatkan, secara tidak langsung pendapatan mereka akan bertambah”.*<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ka. Seksi Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Logi Lisandra pada tanggal 01 Agustus 2018

Dalam beberapa bulan terakhir ini, cuaca melaut sangat buruk sehingga menyebabkan penjelajahan melaut tidak terlalu jauh, sehingga hasil tangkapan yang didapatkan tidak terlalu banyak. Maka dalam hal ini dinas mencoba mengajak nelayan untuk mengikuti pelatihan yang sebenarnya dapat diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat yang dapat memberikan penghasilan tambahan bagi nelayan, seperti seorang nelayan dapat memperbaiki sendiri mesin motor kapal yang rusak tanpa membawanya ke bengkel (sehingga nelayan bisa saja membuka usaha bengkel dan secara tidak langsung pendapatan nelayan bisa bertambah), nelayan dapat membudidayakan ikan air tawar dan menjualnya ke pasar, serta nelayan dapat mengisi waktu kosongnya dengan membuat berbagai macam bentuk olahan ikan dan menjualnya ke pasar, atau mengisi waktu kosongnya dengan membuat kerajinan dari kulit kerang yang bahan bakunya sangat mudah dijumpai sekitar lingkungan pesisir pantai sehingga bisa menjadi barang yang memiliki nilai seni tinggi dan harga jual yang mahal.

Pelatihan ini diadakan sekitaran Pelabuhan Perikanan Lampulo dengan tujuan untuk memberikan wawasan untuk meningkatkan pendapatan nelayan terutama pada saat cuaca melaut buruk atau kendala alam lainnya. Adapun peserta pelatihan tersebut diharapkan semua nelayan yang ada di Pelabuhan Perikanan Lampulo. Namun hal ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, seperti wawancara berikut ini dengan nelayan:

*“Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan nelayan itu usaha saya dan kelompok nelayan sendiri, saya tidak tahu bagaimana program pelatihan yang diadakan oleh dinas, mungkin ada diadakan, tapi saya sendiri tidak pernah tahu adanya pelatihan”.*<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Mustafa pada tanggal 04 Agustus 2018

Wawancara lain juga dipertegas oleh nelayan lainnya:

*“Memang benar ada pelatihan dari dinas, namun dikarenakan saya mengikuti toke boat, tidak sempat untuk ikut pelatihan yang ada, karena kalau tidak melaut maka tidak mendapatkan uang, walaupun cuaca tidak memungkinkan kami tetap akan melaut, walaupun hasilnya tidak terlalu banyak”.*<sup>12</sup>

Wawancara diatas menjelaskan bahwa ada nelayan yang tahu adanya pelatihan dan ada juga nelayan yang tidak tahu bahwa adanya pelatihan, disini terlihat jelas bahwa kurang efektif dan efisien dalam pengadaan program pelatihan disebabkan kurangnya komunikasi antara dinas dan nelayan, maka jika persepsi seperti ini terus berlanjut kedepannya, maka pelatihan yang diadakan sampai kapanpun tidak akan pernah berjalan sesuai rencana (meningkatkan pengetahuan serta menciptakan nelayan yang sejahtera), serta dampak dari program pelatihan tersebut tidak menjamin kesejahteraan nelayan disebabkan tidak semua nelayan mengikuti program pelatihan yang diadakan oleh dinas sehingga menghabiskan biaya, waktu dan tenaga.

#### b) Pemberian bantuan

Bantuan merupakan suatu pemberian baik berupa materil ataupun moril dari dinas kepada individu atau kelompok nelayan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dengan tujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Adapun sifat bantuan yang diberikan oleh dinas yaitu terus berlanjut namun sesuai kebutuhan. Salah satu strategi yang dipilih pemerintah

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Anwar pada tanggal 04 Agustus 2018

untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dilakukan melalui pemberian Kartu Nelayan.

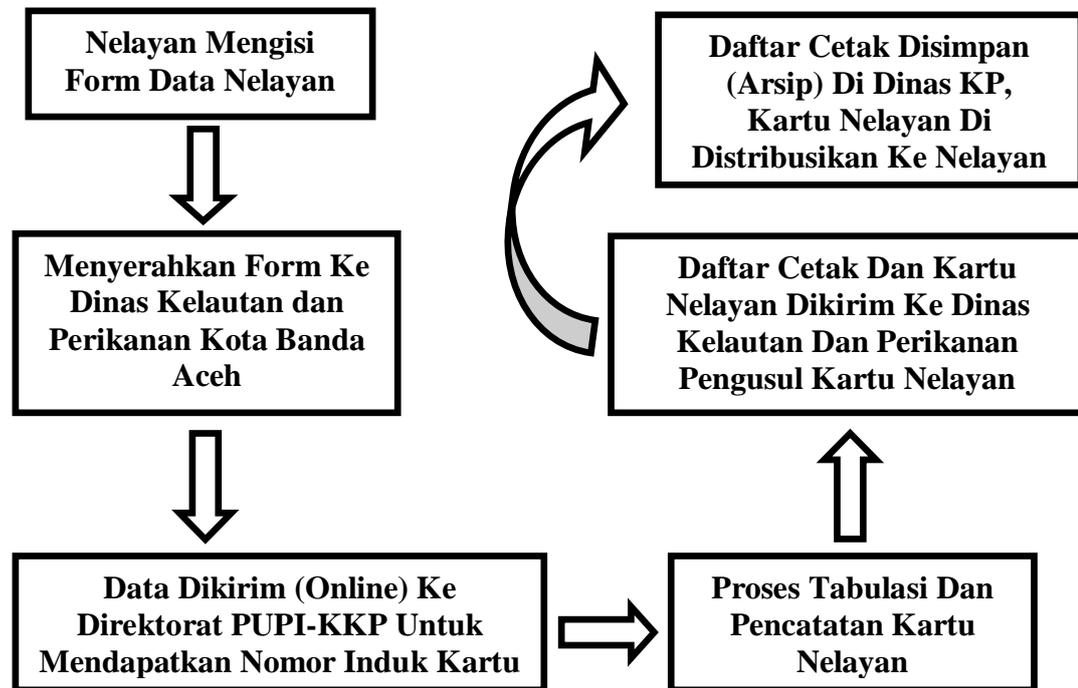
Gambar 1 Contoh Kartu Nelayan



**Sumber:** Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

Kartu Nelayan adalah kartu identitas profesi bagi warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan yang meliputi: nahkoda kapal, perwira kapal, anak buah kapal, pemilik kapal yang ikut serta secara langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan dan yang tidak menggunakan kapal dalam menangkap ikan. Manfaat dari Kartu nelayan adalah bisa menjadi acuan data bagi dinas untuk mengetahui kategori kelompok nelayan, sehingga pemberian bantuan lebih tepat sasaran. Setiap kelompok nelayan yang akan diberikan bantuan ataupun meminta bantuan kepada dinas, maka nelayan harus memiliki Kartu Nelayan. Bagi nelayan yang ingin memiliki Kartu Nelayan, berikut tata cara pembuatan Kartu Nelayan:

Gambar 2 Proses pembuatan Kartu Nelayan (E-Kartu Nelayan)



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh 2017

Kartu nelayan merupakan satu dari persyaratan dalam pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan instrumen pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan langkah-langkah inisiasi pemberdayaan nelayan agar mandiri, profesional dan taat azas. Walaupun dinas sudah memberitahukan tata cara pembuatan kartu nelayan, tetapi masih saja terdapat nelayan yang tidak paham dalam hal pengurusan pembuatan kartu nelayan, berikut hasil wawancara dengan nelayan:

*“Untuk tata cara pembuatan kartu nelayan saya tidak terlalu paham, memang saya sudah mempunyai kartu nelayan, tetapi yang mengurus kartu saya ini panglima laot”.*<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan nelayan terlihat tidak paham dalam pengurusan pembuatan Kartu Nelayan, berarti terlihat jelas bahwa jika

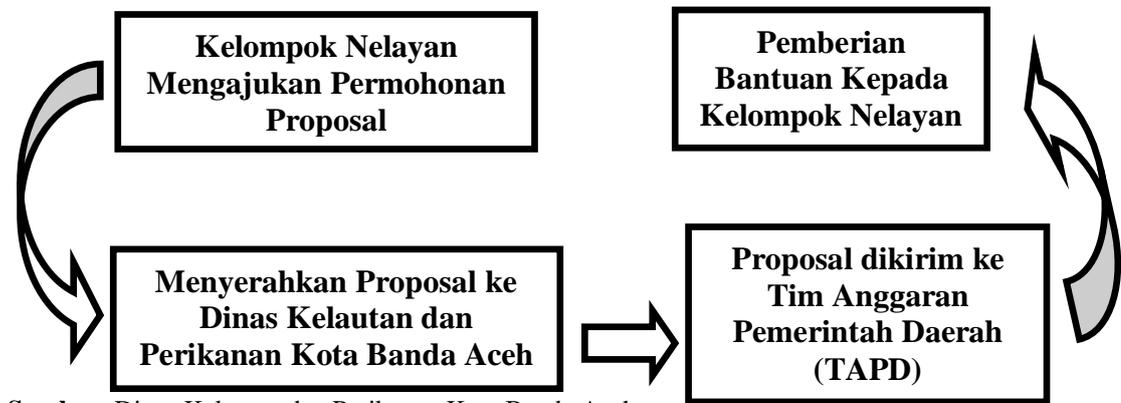
<sup>13</sup>Wawancara dengan bapak Iwan pada tanggal 04 Agustus 2018

benar adanya pelatihan dari dinas, nelayan tentu paham dalam hal pengurusan pembuatan Kartu Nelayan. Namun realita yang ada pemahaman nelayan kurang dalam hal peningkatan pengetahuan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu nelayan yang masa berlakunya sudah habis akan diganti dengan kartu Kusuka. Kartu Kusuka adalah kartu identitas yang diperuntukan untuk nelayan tangkap, pembudidaya, pengolah dan pemasar dan juga sebagai basis data dalam memudahkan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Selain itu, sebagai sarana dalam memantau dan evaluasi pelaksanaan program kementerian. Sedangkan manfaatnya, menjadi pra-syarat program KKP, seperti bantuan pemerintah dan lain-lain.

Jika kelompok nelayan sudah memiliki Kartu Nelayan atau kartu Kusuka maka kelompok nelayan sudah bisa mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. Dengan ketentuan nelayan yang ingin mengajukan permohonan bantuan berdasarkan kelompok bukan individu, karena dinas perikanan bukan mensejahterakan individu tetapi semua kelompok nelayan. Berikut pengajuan permohonan bantuan dan pemberian bantuan oleh dinas kepada kelompok nelayan yaitu :

Gambar 3 Alur Proses Pemberian Bantuan



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

Dari gambar diatas menjelaskan, bahwa pemberian bantuan oleh dinas kepada kelompok nelayan mempunyai tata cara tersendiri yaitu kelompok nelayan mengajukan proposal beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai permohonan yang dibutuhkan, dengan syarat adanya surat keterangan kepala desa, surat keterangan camat dan Panglima Laot serta melampirkan fotokopi KTP. Selanjutnya proposal diajukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan untuk verifikasi keaslian permohonan proposal untuk diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ditingkat Kota Banda Aceh, jika permohonan proposal disetujui maka akan diberikan bantuan kepada kelompok nelayan.<sup>14</sup> Berikut hasil wawancara dengan pegawai terkait prosedur pemberian bantuan kepada kelompok nelayan:

*“Ketika kelompok nelayan mengajukan permohonan bantuan, maka dinas terlebih dahulu memeriksa validitasi berkas, permohonan sesuai kebutuhan atau tidak, jika disetujui, maka dinas akan membeli barang melalui pihak ketiga yaitu kontraktor untuk diserahkan kepada kelompok nelayan dengan menandatangani serah terima dan naskah perjanjian Hibah Daerah serta fakta integritas dari kelompok nelayan yang menyatakan bahwa akan memanfaatkan serta tidak memperjual*

<sup>14</sup> Sumber data dari Dinas Pangan, Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

*belikan barang tersebut, dan adanya monitoring serta evaluasi oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).<sup>15</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, bahwa dinas tidak menyetujui secara mentah-mentah permohonan bantuan, bahkan tidak semua permohonan disetujui, disebabkan bantuan tersebut tidak sesuai kebutuhan atau bantuan sebelumnya masih layak pakai. Setelah bantuan diberikan kepada kelompok nelayan melalui pihak ketiga yaitu kontraktor, dalam hal ini dinas tidak lepas tangan, akan tetapi juga dilakukan monitoring dan evaluasi dari dinas dan juga ada pengawasan dari Inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Tugas Dinas Kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yaitu dengan memberikan bantuan, adapun bantuan yang biasa diberikan biasanya berupa barang. Berikut wawancara terkait pemberian bantuan kepada nelayan:

*“Memang tugas kami adalah memperhatikan kehidupan nelayan, pemerintah selalu memberikan bantuan kepada nelayan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan terciptanya kesejahteraan nelayan. Biasanya pemerintah memberikan bantuan berupa pancing, jaring insang, trammel net (jaring 3 lapis), pukot pantai, jala, GPS, radio komunikasi, fish finder, perahu/kapal motor, baju pelampung, palka ikan dan cold box”.<sup>16</sup>*

Dari analisis peneliti, bantuan yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu para nelayan dalam mencari ikan dengan penyediaan kapal melaut, alat tangkap dan fasilitas penyimpanan ikan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, bantuan yang dimaksud memang murni bantuan dari dinas

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan, Amir Syarifuddin pada tanggal 01 Agustus 2018

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan, Amir Syarifuddin pada tanggal 01 Agustus 2018

bukan berdasarkan permohonan bantuan yang diajukan kelompok nelayan.

Berikut hasil wawancara dengan nelayan terkait pemberian bantuan:

*"Saya nelayan biasa (nelayan kecil) yang pergi melaut dengan kapal orang (toke boat/nelayan juragan) bersama kelompok nelayan lainnya, selama saya menjadi nelayan, tidak pernah mendapatkan bantuan apapun, karena sayapun tidak memikirkan itu, kalau ada alhamdulillah, kalau tidak adapun juga tidak apa-apa, karena saya makan pun dengan uang bagi hasil dengan toke boat".<sup>17</sup>*

Wawancara berikutnya juga dipertegas oleh nelayan lainnya, yaitu:

*"Bantuan itu ada saya dengar diberikan oleh dinas, tapi saya sendiri tidak tahu siapa saja yang mendapatkan bantuan tersebut, namun kelompok saya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun, jika kami membutuhkan sesuatu untuk keperluan melaut kami meminta atau melaporkan kepada toke boat".<sup>18</sup>*

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa ada nelayan yang belum pernah mendapatkan bantuan dari dinas, namun ada juga nelayan yang tahu ada bantuan dari dinas namun tidak tahu kepada kelompok nelayan mana yang mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini menunjukkan kinerja dinas belum efektif ditandai dengan tidak meratanya pemberian bantuan serta kurangnya keterbukaan informasi terkait pemberian bantuan kepada kelompok nelayan.

#### c) Pembangunan sarana dan prasarana

Untuk melancarkan aktivitas keseharian nelayan baik di laut maupun di darat, dalam hal ini dinas menerapkan strategi menjaga dan membangun sarana dan prasarana demi kelancaran para nelayan dalam mencari ikan dan memasarkan ikan. Fakta ini dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu:

*"Beberapa program strategi yang telah terealisasikan sampai saat ini diantaranya program pembangunan dan peningkatan sarana dan*

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Anwar pada tanggal 04 Agustus 2018

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Iwan pada tanggal 04 Agustus 2018

*prasarana baik itu pembangunan dermaga, pembangunan cold storage, pembangunan balai nelayan dan infrastruktur lainnya demi kelancaran aktivitas nelayan, yang mana program bantuan ini untuk mendukung mata pencaharian nelayan”.*<sup>19</sup>

Berikut hasil wawancara dengan nelayan terkait penerapan program yang sudah terealisasi oleh pemerintah:

*“Terkait dengan pembangunan dermaga, balai nelayan, dan pembangunan fisik lainnya semua benar ada dibangun oleh dinas, seperti yang sudah terlihat saat ini. Bahkan sangat membantu kami para nelayan dalam beraktivitas di darat maupun di laut”.*<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Dinas telah berupaya menjaga dan membangun kebutuhan sarana dan prasarana demi kelancaran aktivitas melaut, bahkan diterima sangat baik oleh nelayan, karena nelayan menganggap pembangunan tersebut sangat membantu para nelayan. Namun tidak semua pembangunan berjalan dengan lancar, hal ini dipertegas dalam wawancara dengan seorang nelayan:

*“Untuk pembangunan fisik patut diberikan apresiasi kepada pemerintah, namun yang sangat saya sayangkan disini pembangunan pasar ikan yang belum difungsikan (dipergunakan)”.*<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan, Amir Syarifuddin pada tanggal 01 Agustus 2018

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak Anwar pada tanggal 04 Agustus 2018

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Mustafa pada tanggal 04 Agustus 2018



**Gambar 4:** Bangunan pasar ikan

Wawancara tersebut juga didukung dengan adanya berita yang dimuat oleh Serambi bahwa ada tiga fasilitas bisnis yang dibangun pemerintah pusat di kawasan Industri Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Kota Banda Aceh hingga kini belum difungsikan. Ketiga fasilitas bisnis tersebut adalah ruang pendingin ikan (*Cold Storage*), pasar ikan dan pasar pengolahan ikan. *Cold storage* belum berfungsi lantaran belum adanya jaringan listrik. Sementara pasar ikan masih membutuhkan dana tambahan untuk menambahkan fasilitas yang masih kurang seperti meja jualan di pasar ikan belum ada, jumlah kios jualan masih terbatas.<sup>22</sup> Dari fakta tersebut menjelaskan bahwa pemerintah sudah membangun pembangunan fisik namun belum dapat difungsikan akibat keterbatasan dana, maka strategi pembangunan sarana dan prasarana tidak berjalan efektif dan efisien disebabkan pembangunan yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu, namun jika hal ini tidak ditangani secepatnya maka pembangunan yang menjadi harapan nelayan akan menjadi sia-sia, maka bangunan akan rusak sedikit demi sedikit sehingga akan membutuhkan dana yang lebih banyak lagi.

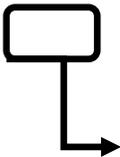
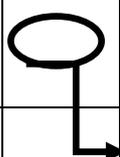
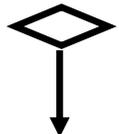
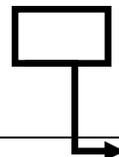
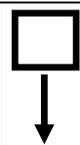
---

<sup>22</sup> <https://serambinews.com/2018/05/22/cold-storage-belum-difungsikan>. diakses pada tanggal 05 Agustus 2018, jam 14.00

d) Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)

Strategi lain dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan yaitu dengan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal itu diwujudkan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), sebagai salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pengeluaran Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) disebabkan karena profesi nelayan memiliki resiko yang cukup tinggi, yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan. Saat melakukan kegiatan penangkapan ikan, nelayan seringkali dihadapkan pada cuaca yang tidak bersahabat hingga mengakibatkan kecelakaan, dan seringkali terjadi tabrakan di laut. Adapun tata cara pembuatan Kartu Asuransi Nelayan, yaitu:

Tabel 8 Pembuatan Kartu Asuransi Nelayan

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Buku		
		Nelayan	DKKP	Tim Verifikasi Dinas Kota	Tim KKP/DKP Aceh	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	output
1	Pengajuan					1. KTP 2. KK 3. Kartu Nelayan 4. Form F1	15 Menit	
2	Penerimaan Berkas						15 Menit	
3	Verifikasi					Memverifikasi kelengkapan bahan sesuai dengan persyaratan	30 Menit	
4	Input Secara Online					Komputer dan jaringan online	15 menit	Nomor Kartu Asuransi Nelayan
5	Proses Tabulasi					Komputer dan jaringan online	15 Menit	Rekapitulasi Data KN Tersedia
6	Percetakan Kartu Asuransi Nelayan					Komputer dan jaringan online dan printer khusus KN	1 Minggu	Kartu Asuransi Nelayan Tersedia

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

Persyaratan penerima bantuan asuransi nelayan:

- 1) Nelayan kecil dan nelayan tradisional
- 2) Memiliki kartu nelayan
- 3) Berusia maksimal 65 tahun

- 4) Ukuran kapal maksimal 10GT
- 5) Tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah
- 6) Patuh pada ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Mengisi formulir (AN-1 dan AN-2)
- 2) Melampirkan fotokopi kartu nelayan dan kartu keluarga
- 3) Melampirkan fotokopi buku tabungan (bila ada)
- 4) Ahli waris yang ditunjuk harus melampirkan sesuai dengan poin 2 dan 3 (apabila ahli waris <17 tahun tidak perlu melampirkan KTP).

Adapun manfaat dari bantuan asuransi nelayan ini adalah:

- 1) Santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan yang menyebabkan kematian mendapatkan santunan berjumlah Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
- 2) Santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas di darat yang menyebabkan kematian mendapatkan santunan berjumlah Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)
- 3) Santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan yang menyebabkan cacat tetap mendapatkan santunan berjumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- 4) Santunan untuk biaya pengobatan mendapatkan berjumlah Rp. 20.000.000

Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan

usaha penangkapannya. Manfaat yang diperoleh antara lain ketentraman dan kenyamanan bagi nelayan, dan meningkatnya kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri. Bantuan Premi Asuransi Nelayan bekerja sama dengan PT. Jasindo, pembayaran premi asuransi nelayan dibantu selama setahun, setelah itu nelayan dapat melanjutkan polisnya secara mandiri dengan jumlah premi polis asuransi sekitar Rp. 175.000 pertahun, bahkan Kartu Asuransi Nelayan sudah dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh sebanyak 148 Jiwa.

Program asuransi ini merupakan bentuk kebijakan tegas untuk nelayan kecil/nelayan tradisional agar mereka mampu berdaya dan melangsungkan kegiatan penangkapannya. Besaran manfaat santunan asuransi nelayan hingga mencapai Rp. 200 juta merupakan kebijakan tegas untuk membantu nelayan kecil sektor perikanan nasional. Kebijakan ini sudah berjalan dari tahun 2016 dan sekarang yang sudah tersebar hingga 34 provinsi seluruh Indonesia. Berikut hasil wawancara dengan salah satu pegawai:

*“Premi Asuransi nelayan ini sudah terealisasi dengan baik, bahkan sudah ada dari nelayan kita yang sudah merasakan bantuan tersebut untuk pengobatan, walaupun belum ada yang berhujung dengan kematian, kita harap jangan sampai nelayan kita merasakan hal yang demikian”.*<sup>23</sup>

Wawancara berikut juga dipertegas oleh salah satu nelayan:

*“Premi asuransi nelayan itu benar adanya bahkan saya sudah memiliki kartunya, namun saya juga tidak tahu benar atau tidaknya santunan itu dijalankan, karena belum ada dari saya dan rekan saya*

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ka. Seksi Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Logi Lisandra pada tanggal 01 Agustus 2018

*yang mengalami kecelakaan, semoga dijauhkan dari musibah walaupun ada santunan sedemikian banyak”.*<sup>24</sup>

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah sudah merealisasikan program bantuan asuransi nelayan dengan dibuktikan dari bentuk pengeluaran kartu asuransi yang sudah diterima oleh nelayan.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan**

Dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemerintah mempunyai faktor pendukung yang mempengaruhi pekerjaan menjadi berkembang lebih dari sebelumnya, serta mempunyai faktor penghambat yang mempengaruhi pekerjaan bahkan menghentikan dalam menerapkan strateginya seperti sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung:

a) Faktor pendukung bersifat internal:

- 1) Pegawai yang mencukupi, dalam mendukung kerja dinas untuk melayani dan memenuhi kebutuhan nelayan, maka harus memiliki pegawai yang mencukupi. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh memiliki jumlah pegawai yang mencukupi berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan kebutuhan agar pekerjaan menjadi cepat.

b) Faktor pendukung bersifat eksternal:

- 1) Lokasi yang strategis, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh terletak di Jl.Tgk Dikandang, Gampong Pande, Kuta Raja,

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak Mustafa pada tanggal 04 Agustus 2018

yang mudah dijangkau oleh nelayan dan dekat dengan Pelabuhan Perikanan Lampulo, dengan letaknya tidak terlalu jauh maka mendukung kerja dinas, lebih cepat dan tidak menghabiskan waktu terlalu banyak ketika dinas berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Lampulo, begitu juga dengan nelayan ketika mendatangi kantor dinas.

- 2) Hubungan Kerja yang baik, hubungan kerja yang baik menjadi faktor pendukung bagi dinas, karena dinas tidak bisa bekerja sendiri, maka dengan adanya hubungan kerja yang baik antara dinas, camat, keuchik dan panglima laot menjadikan pekerjaan lebih mudah.

b. Faktor Penghambat:

a) Faktor penghambat bersifat internal:

- 1) Keterbatasan dana, dengan keterbatasan dana maka sangat sulit untuk meningkatkan program pembangunan fisik dan nonfisik. Jadi untuk saat ini walaupun keterbatasan dana, program tetap dijalankan baik dari pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan pengetahuan para nelayan.
- 2) Fasilitas yang tidak memadai, dimana ruang tata kerja yang tidak beraturan, komputer yang tidak cukup.
- 3) Tingkat pendidikan nelayan rendah, dengan rendahnya pendidikan nelayan maka rendahnya pengetahuan nelayan, maka menjadi faktor penghambat bagi dinas dalam mengadakan program serta

sosialisasi dengan nelayan. Karena nelayan hanya bisa mengeluh dan mengkritik apa yang dilakukan oleh dinas tanpa tahu apa yang menjadi kendala bagi dinas.

Berikut hasil wawancara dengan pegawai terkait faktor penghambat:

*"Faktor memang selalu ada di setiap program yang ingin dilaksanakan, apalagi dengan keterbatasan dana, itu sangat sulit dinas dalam bekerja, makanya penting bagi nelayan mengikuti pelatihan peningkatan pengetahuan nelayan, bukan hanya bisa mengeluh dan mengkritik ke dinas, karena tugas pemerintah bukan hanya membantu nelayan, tetapi juga pemerintah mengutamakan untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat lainnya, kalau dinas menuruti selalu keinginan nelayan tidak akan pernah puas, karena harapan nelayan ini tinggi".<sup>25</sup>*

b) Faktor penghambat bersifat eksternal:

- 1) Kurangnya partisipasi nelayan, nelayan yang sulit diajak bekerjasama ini tentunya akan menghambat kinerja para dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, jika semua nelayan berpartisipasi dalam program yang diadakan oleh dinas contohnya mengadakan pelatihan, jika semua nelayan mengikuti pelatihan tentunya nelayan yang memiliki pendidikan rendah bukan menjadi faktor penghambat lagi, karena nelayan sudah paham untuk pengelolaan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Adapun yang menjadi kendala bagi nelayan dalam berpartisipasi, berikut wawancara dengan nelayan:

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ka. Seksi Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Logi Lisandra pada tanggal 01 Agustus 2018

*“Bukannya saya tidak mendukung program dari pemerintah, namun posisi saya bergantung pada toke boat, jika saya mengikuti pelatihan saya dapat ilmunya saja, uangnya kan tidak dapat, sekarang bukan masalah pintarnya, namun bagaimana cara saya menghidupi keluarga saya dari hasil melaut, jika satu hari saya tidak melaut dan saya mengikuti pelatihan, saya tidak dapat uang untuk satu hari itu”.*<sup>26</sup>

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa, penyebab nelayan tidak berpartisipasi karena bergantung kehidupannya sehari-hari dari hasil tangkapan yang dipimpin oleh toke boat, dimana nelayan beranggapan bahwa dengan mengikuti pelatihan, maka nelayan hanya mendapatkan ilmu namun tidak mendapatkan uang. Namun hal lain menunjukkan bahwa nelayan tidak bisa mengikuti pelatihan karena nelayan bekerja dibawah tekanan toke boat.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan bapak Anwar pada tanggal 04 Agustus 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh sudah menyusun strategi yang disusun dalam Renstra 2017-2022. Strategi yang diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil (nelayan buruh) Gampong Lampulo yaitu memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan nelayan, pemberian bantuan berupa barang untuk mendukung nelayan dalam penangkapan ikan, membangun sarana dan prasarana demi kelancaran aktivitas nelayan sehari-hari, serta pemberian Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) bagi nelayan kecil.
2. Dalam menjalankan strategi terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, adapun faktor pendukungnya yaitu: pegawai yang mencukupi, lokasi yang strategis serta hubungan kerja yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: keterbatasan dana, fasilitas yang tidak memadai, tingkat pendidikan nelayan rendah serta kurangnya partisipasi nelayan.

## **B. Saran**

1. Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dalam menerapkan strategi sebaiknya musyawarah terlebih dahulu dengan nelayan atau melibatkan nelayan dalam perancangan strategi, serta lebih mendekatkan diri dengan nelayan agar bisa mengetahui apa yang diharapkan nelayan, agar penerapan strategi berjalan sesuai rencana serta efektif dan efisien.
2. Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk lebih cepat tanggap dalam mengatasi masalah serta cepat dan kreatif dalam mencari jalan keluar (solusi) untuk mengatasi faktor penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan serta mempertahankan dan meningkatkan yang mendukung kinerja dinas dalam upaya peningkatkan kesejahteraan nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Dimiyati, Johni, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Husein, Umar, *Strategic Management in Action*, Jakarta: PT.Gramedia Utama, 2001.
- Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan*, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Lubis, Mayang Sari, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Raco,J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis,Karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: PT.Grasindo, 2010.
- Salusu,J. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan organisasi Nonprofit*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan social*, Yogyakarta: PT.Hanindita, 1987
- Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Welfare indicators, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: BPS, 2006.
- Wiyaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2018.

## **Skripsi dan Jurnal**

Annisa Dwi Rachma. *Kondisi dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Nelayan di Desa Pasir Kebumen*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

David Z. *Usaha-Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Nelayan pada Desa Pasar Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat*, Bandar Lampung: Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2017.

Ririn Marini, *Analisis Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya*, Meulaboh: Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar, 2013.

Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Batu Bara: Jurnal Geografi, Vol.9, No.1.2017

## **Sumber Undang-Undang**

Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam*.

## **Internet**

<https://dkp.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2016/10/12/116/pelabuhan-perikanan-lampulo.html>

<https://gamponglampulo.com/sejarah-gampong-lampulo/>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2018, jam 14.00

<https://news.detik.com/berita/2605821/ini-visi-misi-jokowi-jk-soal-pembangunan-maritim-indonesia?9922032>, di akses pada tanggal 23 Mei 2018, jam 10.00.

[https://serambinews.com\\_Nelayan\\_Aceh](https://serambinews.com_Nelayan_Aceh). Diakses pada tanggal 23 Mei 2018, jam 11.00

<https://serambinews.com/2018/05/22/cold-storage-belum-difungsikan>. diakses pada tanggal 05 Agustus 2018, jam 14.00

[http://www.academia.edu/32993954/Metode\\_Penelitian\\_kualitatif](http://www.academia.edu/32993954/Metode_Penelitian_kualitatif), di akses pada tanggal 7 Juni 2018, jam 11.00



# **PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

### **KOTA BANDA ACEH**

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888

Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

## **SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 070 / 355**

- Dasar** : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Membaca** : - Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Ar-Raniry Nomor: B-1026/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/07/2018 Tanggal 09 Juli 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan** : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

**Nama** : Ramadhan

**Alamat** : Jl. Jend. Sudirman, Gp. Pie, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh

**Pekerjaan** : Mahasiswa

**Kebangsaan** : WNI

**Judul Penelitian** : Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Kota Banda Aceh

**Tujuan Penelitian** : Untuk mengetahui strategi Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)

**Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian** : - Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh  
- Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh  
- Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

**Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian** : 3 (tiga) bulan

**Bidang Penelitian** : Ilmu Administrasi Negara

**Status Penelitian** : Baru

**Penanggung Jawab** : Muji Mulia (Wakil Dekan I)

**Anggota Peneliti** : -

**Nama Lembaga** : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Ar-Raniry

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPD/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh

Pada Tanggal : 16 Juli 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH, *Yk*



Faisal, S.STP

*Yk* Pembina Tk. I / NIP.19780101 199810 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPD Kota Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
**KANTOR CAMAT KUTA ALAM**

JL. Syiah Kuala No.4 Telp. (0651) 32407. Kode Pos-23126  
BANDAACEH

SURAT IZIN

No. 070/ 387

TENTANG

**IZIN PENELITIAN**

- Dasar : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kota Banda Aceh, Nomor 070/355/2018 tanggal 16 Juli 2018
- Nama : RAMADHAN
- NIM : 140802003
- Program Studi : S-1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
- Judul Penelitian : Strategi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Kota Banda Aceh
- Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui Strategi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Kota Banda Aceh ( Pengumpulan data data - dan wawancara di Gampong Lampulo ) Waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan.

Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal 17 Juli 2018

Pjt. CAMAT KUTA ALAM



## **DAFTAR PERTANYAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

### ***Tentang Strategi :***

1. Apakah Dinas Perikanan memiliki strategi terkait mensejahterakan nelayan ? jika ada, apa strateginya ?
2. Bagaimana perumusan kebijakan strategi, apakah melibatkan nelayan ?
3. Apakah Dinas Perikanan dalam menerapkan strategi sudah sesuai dengan harapan nelayan ?
4. Apakah strategi yang diterapkan sudah terealisasi dengan baik?
5. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. ?
6. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan?
7. Apakah ada mekanisme evaluasi dan pengawasan dalam setiap strategi yang dilaksanakan ? jika ada, bagaimana mekanismenya ?

### ***Tentang Bantuan :***

1. Bantuan seperti apa yang selalu diberikan Dinas Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan ?
2. Apa saja kriteria nelayan yang akan diberikan bantuan ?
3. Apakah semua bantuan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan nelayan?
4. Bagaimana proses penyaluran bantuan dari Dinas Perikanan untuk nelayan ?
5. Apakah ada mekanisme evaluasi dan pengawasan setelah pemberian bantuan kepada nelayan ? jika ada, bagaimana mekanismenya ?

### ***Tentang Pemberdayaan Nelayan :***

1. Apa saja program pemberdayaan nelayan yang diadakan Dinas Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan ?
2. Apa tujuan dari diadakannya program pemberdayaan nelayan ?
3. Sejauh manakah program pemberdayaan nelayan dilaksanakan ?
4. Kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan nelayan.

## **DAFTAR PERTANYAAN NELAYAN**

### ***Tentang strategi :***

1. Sudah berapa lama bapak menjadi nelayan ?
2. Apa saja program yang diadakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh yang bapak ketahui untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan ?
3. Apakah dalam perencanaan program melibatkan musyawarah dengan nelayan ?
4. Apakah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh pernah memberikan bantuan selama bapak menjadi nelayan ? jika pernah apa saja bantuan yang bapak dapatkan ?
5. Berapa tahun sekali Dinas memberikan bantuan ?
6. Apa dampak dari hasil setelah bapak mendapatkan bantuan ?
7. Apakah bantuan yang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran ?
8. Apakah nelayan memiliki organisasi koperasi ?

### ***Indikator kesejahteraan :***

1. Berapa orang yang tinggal bersama bapak dalam satu rumah ?
2. Berapa orang anak bapak ? usianya ?
3. Apakah bapak atau keluarga lainnya mempunyai pekerjaan selain nelayan ?
4. Keluarga bapak biasanya makan berapa kali sehari ?
5. Keluhan penyakit apa saja yang bapak dan keluarga alami? Bagaimana mengatasinya?
6. Bagaimana kondisi rumah bapak, semi permanen atau permanen ? apakah keluhan dengan kondisi rumah yang bapak tempati ?
7. Apakah bapak masih bisa melihat huruf dengan jelas ?

### ***Sebab-sebab kemiskinan nelayan :***

1. Apakah yang menjadi kendala bapak selama menjadi nelayan, apakah keterbatasan modal dan alat tangkap ?
2. Jika bapak nelayan kecil, bagaimana hubungan kerja antara toke boat dengan bapak, apakah menguntungkan bagi bapak ?
3. Jika kondisi alam tidak memungkinkan untuk melaut, bahkan bisa jadi beberapa hari, secara tidak langsung bisa menghambat pendapatan bapak, jadi untuk mengatasi itu apa usaha bapak untuk menambah pendapatan?
4. Apakah bapak sering mengambil pinjaman kepada toke boat?
5. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman ? (toke boat)

6. Apa harapan bapak untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan ?

## DOKUMENTASI PENELITIAN



**Gambar:** Kondisi Pelabuhan Gampong Lampulo



**Gambar:** Kondisi Dinas P2KP Kota Banda Aceh



## **BIODATA PENULIS**

1. Nama : Ramadhan
  2. Tempat/Tanggal Lahir : Tutong, 20 Januari 1996
  3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  4. Agama : Islam
  5. Status : Belum Kawin
  6. Kebangsaan : Indonesia
  7. Alamat : Desa Tutong, Labuhanhaji Barat, Aceh Selatan
- 
1. Orang Tua/Wali
    - a. Ayah : Rajudin Abbas
    - b. Ibu : BaidahAlamat : Desa Tutong, Labuhanhaji Barat, Aceh Selatan
  2. Pendidikan
    - a. SD : SD N 2 Blangkejeren
    - b. SMP : SMP N 2 Blangkejeren
    - c. SMA : SMA N 1 Labuhanhaji Tengah
    - d. S-1 : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry

Demikianlah daftar riwayat hidup yang saya perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.